

WALIKOTA KENDARI
NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA KENDARI TAHUN 2006 DAN AKHIR MASA JABATAN 2002-2007
SERTA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN APBD
PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN 2006

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Kendari;

Yth. Saudara Walikota Kendari;

Yth. Para Pimpinan Partai-Partai Politik dan Tokoh Masyarakat;

Yth. Rekan-Rekan Anggota Muspida Kota Kendari;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kota; dan Para pejabat Sipil Lingkup Pemda Kota
Hadirin, undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-nyalah, sehingga pada saat ini kita masih hadir di tempat ini, dalam rangka penyampaian Laporan keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun masa Jabatan Walikota Kendari selaku Kepala Daerah Tahun 2002-2007.

Sidang Dewan yang terhormat,

Secara pribadi, ungkapan Rasa Syukur yang mendalam kepada Allah SWT, diiringi ungkapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Kota Kendari yang benar-benar telah menjadi mitra dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah; dan

kemitraan ini ditunjukkan dengan karya nyata Saudara-saudara Dewan dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan partai politik; dan yang sangat membanggakan kita semua kemitraan antara Pemerintah Kota dan DPRD telah diakui baik oleh lembaga pusat maupun oleh daerah-daerah lain sehingga menjadikan Kota Kendari ini sebagai contoh yang baik "Kerjasama antara Eksekutif dan legislatif" dan juga kepada rekan-rekan MUSPIDAH, para Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat, dan Pimpinan Ormas, Parpol serta semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kerjasama selama saya mengemban amanah sebagai Kepala Daerah, dimana hari ini adalah momen yang kedua kalinya, saya selaku Kepala Daerah berdiri dihadapan anggota dewan yang terhormat dan hadirin sekalian dalam sidang Paripurna, untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun masa jabatan serta LAKIP dan rancangan PERDA APBD Perhitungan Anggaran Tahun 2006.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam negeri Nomor 131.54-175 tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002, pada tanggal 7 Oktober 2002, saya dilantik sebagai Walikota Kendari untuk periode kedua, oleh Menteri Dalam negeri, Atas Nama Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masa bakti tugas saya selaku Walikota Kendari akan berakhir tanggal 7 Oktober 2007, dan sebelum berakhir masa jabatan sebagai Walikota Kendari pada tanggal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa LAKIP Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta LAKIP Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatab kepala daerah, mengingat penyampaian kedua laporan in i waktunya hanya selesai kurang dari 1 (satu) bulan, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kami saudara para anggota Dewan LKPJ ini disampaikan secara bersamaan.

Kemudian, perlu juga kami sampaikan bahwa ketika penyampaian LKPJ ini, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja selesai melakukan pemeriksaan sesuai Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Bepeka Republik Indonesia di Kendari Nomor 20/ST/BPK/XIV.KDI/03/2007 Tanggal 9 Maret 2007, dimana LHP dan opini

sementara dalam penyusunan dan nantinya akan disampaikan langsung ke DPRD Kota Kendari.

Adapun ruang lingkup dari LKPJ, yang akan saya sampaikan, sesuai anamah PP Nomor 3 Tahun 2007, meliputi; arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Kesemua ini kami sajikan dalam buku laporan yang dilengkapi dengan LAKIP serta rancangan Perda APBD Hasil Perhitungan Tahun Anggaran 200.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat,

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan, atau yang dikenal dengan "pertanggungjawaban Lima Tahunan", adalah merupakan akumulasi secara integritas atas referensi pertanggungjawaban tahunan yang telah saya sampaikan di hadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kendari pada setiap tahunnya, dimana dalam kurun waktu Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005 Walikota Kendari telah diterima dengan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari masing-masing sebagai berikut:

- 1) LKPJ Tahun 2002 telah dikukuhkan dengan Keputusan DPRD Kota Kendari Nomor 13/DPRD/2003, Tanggal 3 Mei 2003;
- 2) LKPJ Tahun 2003 telah dikukuhkan dengan Keputusan DPRD Kota Kendari Nomor 09/DPRD/2004, Tanggal 30 April 2004;
- 3) LKPJ Tahun 2004 telah dikukuhkan dengan Keputusan DPRD Kota Kendari Nomor 09/DPRD/2005, Tanggal 3 September 2005;
- 4) LKPJ Tahun 2005 telah dikukuhkan dengan Keputusan DPRD Kota Kendari Nomor 08/DPRD/2006, Tanggal 15 Agustus 2006;

Sedangkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2006 bersamaan disampaikan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan, tentunya untuk membahas kedua LKPJ ini termasuk APBD Hasil Perhitungan tahun Anggaran 2006 teknisnya akan diatur tersendiri dalam internal dewan.

Sebagaimana dimaklumi, pemenuhan tugas kami selaku Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Petanggungjawaban setiap tahunnya, disamping merupakan gambaran kesungguhan dan kerjakeras dalam melaksanakan tugas

pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan seluruh jajaran Pemerintah Kota Kendari, namun juga adalah buah dari kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislative, sehingga tercipta hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.

Kemudian, sesuai dengan PP Nomor 3/2007, bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD sedangkan untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu, maka orientasi laporan ini, akan menguraikan beberapa pencapaian bidang-bidang utama secara ringkas dari bidang kewenangan wajib maupun pilihan dalam kerangka pencapaian delapan isu prioritas Pembangunan kota Kendari.

Namun sebelum kita memasuki pada substansi penjelasan pelaksanaan program dan kegiatan, maka perkenankanlah saya sampaikan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah kota Kendari Tahun 2002-2007.

1. **Visi dan Misi**

Sebagai upaya untuk mempertahankan suatu komitmen jangka panjang Pembangunan kota Kendari, maka orientasi Pembangunan kota Kendari berpijak pada Visi Pembangunan (Perda Nomor 10/2001) yakni, *mewujudkan kendari Tahun 2020 sebagai kota Dalam Taman yang Bertaqwa, Maju, Demokratis dan Sejahtera* dengan 6 (enam) misi yakni: (1) Misi Lingkungan; (2) Misi Sosial Kemasyarakatan; (3) Misi pelayanan; (4) Misi Perekonomian; (5) Misi Profesionalisme Aparat; dan (6) Misi pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Untuk menjaga konsisten antara komitmen jangka panjang dan jangka menengah dan seterusnya hingga program/kegiatan tahunan, Pemerintah kota kendari menetapkan suatu rancangan strategis (Perda Nomor 15 Tahun 2003) yang merupakan serangkaian program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

2. **Arah kebijakan Umum dan Prioritas**

Substansi pokok dari Renstra Pemerintah Kota Kendari Tahun 2003-2007 tersebut, adalah penetapan 8 (delapan) isu prioritas sebagai berikut:

- (1) meningkatkan kelestarian dan Keserasian Lingkungan;
- (2) Mengembangkan Kapasitas Pelayanan Prasarana Dasar Perkotaan;

- (3) Meningkatkan Derajat Kesehatan;
- (4) Memantapkan pendidikan nasional;
- (5) Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan ketertiban
- (6) Mewujudkan Supremasi Hukum dan pemerintahan yang Baik;
- (7) Mempercepat Pemulihan ekonomi daerah, Penanganan kemiskinan dan Pengangguran;
- (8) Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Aparat Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat

Pada masa kepemimpinan kami, banyak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada bidang keuangan, yakni mulai dengan keluranya, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian, sebagai implementasi reformasi bidang pengelolaan keuangan daerah, menindaklanjuti dengan PP nomor 58 Tahun 2005. Sebagai bukti komitmen terhadap semangat reformasi, maka Pemerintah kota kendari merespon di bidang keuangan tersebut, baik dengan persiapan sumberdaya manusia, emlalui pelatihan bagi seluruh pengelola keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun penyelenggaraan praktek pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya mengalami perubahan hal ini disebabkan antara lain adanya kebutuhan belanja Pemerintah Kota yang cenderung meningkat serta adanya kebijakan pengelolaan keuangan pusat melalui peraturan-peraturan baru terkait masalah pengelolaan keuangan daerah, dan saat ini sistem pengelolaan keuangan daerah menggunakan Permendagri 13/2006. Bertolak dari kondisi relative kecilnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD), terhadap APBD, maka upaya peningkatan sumber-sumber PAD terus digalakkan baik melalui optimalisasi peningkatan dari pospos yang sudah ada (intensifikasi), maupun yang bersipat perluasan sumber-sumber PAD yang baru dan bersifat potensial (Ekstensifikasi). Meskipun demikian, prinsip kebijaksanaan pengembangan PAD, diupayakan secara proposional dengan tidak bersifat membebani kegiatan perekonomian masyarakat, yang kemudian berimplementasi pada ekonomi biaya tinggi (High Cost). Tentunya, ekonomi biaya tinggi, pada akhirnya akan mengurangi daya saing produk, maupun pelayanan Kota Kendari.

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kendari, dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja semakin baik dan sehat. Kondisi ini utamanya dapat ditunjukkan dari penilaian baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Bawasda Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap laporan Realisasi Anggaran tiap tahunnya, bahwa dalam pelaksanaan APBD Kota Kendari setiap tahunnya (tahun 2002-2006), dinyatakan berjalan dengan baik dalam Pemeriksaannya tidak ada temuan yang berindikasi dan mengarah pada kerugian Negara atau daerah, kecuali sedikit kelemahan-kelemahan administrasi sebagai akibat penyesuaian terhadap perubahan pola manajemen keuangan yang baru. Bahkan kita masuk kategori 13 besar dari 550 Kabupaten/Kota yang pengelolaan keuangannya dianggap terbaik bebas KKN.

Dari kinerja pencapaian setiap tahunnya, menunjukkan peningkatan jumlah. Dari sisi pendapatan daerah, tahun 2002 menunjukkan angka Rp.156.590.444.518,45 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan belas koma empat puluh lima rupiah) kemudian tahun 2007 meningkat sebesar Rp. 378.919.261.825 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) berarti terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 28,4% pertahun.

Hingga saat ini, penyumbang terbesar dari peningkatan pendapatan tersebut adalah masih dari dana perimbangan pusat-daerah yang berkisar antara 80-90%. Kemudian jika melihat kinerja mobilitasi sumber-sumber penerimaan asli daerah melalui pos-pos Pendapatan Asli Daerah, kontribusi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2001 sebagai Tahun Akhir Pertanggungjawaban periode pertama saya, komposisi PAD sebagai berikut:

Realisasi PAD	Tahun 2001	Tahun 2006
a. Pajak daerah	Rp. 4.832.218.442,54	Rp. 7.233.695.530,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 3.305.310.783,15	Rp. 7.867.912.565,00
c. Lain-Lain		
Pendapatan Daerah	Rp. 705.491.040,89	Rp. 5.103.686.990,70

Dari data yang dikemukakan diatas, bahwa ada peningkatan yang berarti dari pos-pos PAD tersebut dengan pertumbuhan masing-masing pertahunnya, yakni pajak

daerah bertumbuh 11 persen, retribusi daerah 29 persen dan pendapatan lainnya sebesar 95 persen.

Keberhasilan dalam memobilisasi sumber-sumber penerimaan asli daerah, adalah merupakan buah dari kebijaksanaan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang kami lakukan, seiring dengan itu, adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk secara disiplin memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak dan retribusi sebagai refleksi tanggungjawab dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota secara bersamaan, pada konteks ini, kami juga ingin memberikan apresiasi terhadap pihak legislatif melalui kerjasama yang baik, utamanya dalam menetapkan perda-perda sebagai pemenuhan azas legalitas pemerintah kota dalam meningkatkan atau memperluas sumber-sumber penerimaan baru.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi belanja, pos belanja juga terus mengalami peningkatan. Dibandingkan pada Tahun Anggaran 2001, komposisi pos belanja, adalah belanja rutin sebesar Rp. 77.804.501.713,04 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tiga belas koma nol empat rupiah) dan belanja pembangunan sebesar Rp. 22.264.536.288,10 (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan koma sepuluh rupiah) komposisi ini terus bergeser, dari tahun ke tahun hingga tahun anggaran 2006, komposisi belanja aparatur sebesar Rp. 121.738.742.139 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan belanja publik sebesar Rp. 168.025.674.725 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) komposisi belanja yang sebesar kepada belanja publik dibandingkan dengan belanja aparatur adalah bukti komitmen pemerintah kota kendari untuk memberikan proporsi yang seimbang, bahkan lebih besar kepada pos belanja publik, yakni belanja yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen ini, tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip utama pelaksanaan otonomi daerah, bahwa otonomi daerah berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hadirin, undangan serta Sidang Dewan yang berbahagia,

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang diakibatkan dari dampak krisis ekonomi yang hingga sekarang masih dalam tahap perbaikan ekonomi nasional, hal tersebut berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kota kendari yang memiliki sektor strategis pada sektor pertanian terus mengalami penurunan dan di gantikan dengan sektor-sektor perkotaan, penurunan pada sektor pertanian berimplikasi terhadap pola hidup masyarakat yang cenderung untuk beralih fungsi mata pencaharian pada sektor-sektor perkotaan seperti ; perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa.

Oleh karena itu dengan kondisi ekonomi daerah serta dampaknya terhadap aspek sosial, maka kebijakan ekonomi Kota kendari di kaitkan dengan potensi unggulannya adalah :

1. Melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan memacu kembali pertumbuhan sektor strategis seperti perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah, pengangkutan dan komunikasi serta pertanian dalam arti luas dan sektor jasa-jasa;
2. Memperkuat landasan perekonomian daerah dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberdayakan sektor swasta.

Mengingat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang di miliki oleh Pemerintah Kota Kendari, maka APBD Kota diarahkan untuk menangani program prioritas dan strategis yang diharapkan akan menjadi generator pada sektor-sektor lainnya baik dalam mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kapasitas pelayanan kota secara menyeluruh, oleh karena dalam memorsikan alokasi anggaran yang terbatas, jika di bandingkan kebutuhan program kegiatan prioritas berdasarkan tuntutan aspirasi masyarakat sangat tinggi khususnya program pemerataan dan pemberdayaan, maka kebijakan yang di tempuh adalah pengalokasian pembiayaan secara proporsional dengan melalui tiga pendekatan kelompok program, yaitu; (1) Program Pemerataan, (2) Program Strategis, (3) Program Inovasi. **Pertumbuhan Ekonomi**

Struktur pertumbuhan ekonomi Kota Kendari sesuai kondisinya secara sektoral dipengaruhi 9 (sembilan) sektor utama dan masing-masing sektor mempunyai ruang dan proporsi yang berbeda, dimana sasaran akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, dan pembangunan kemasyarakatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 mengalami peningkatan rata-rata mencapai 8,15% pertahun, atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berkisar 6-7%, PDRB perkapita tahun 2005 atas dasar harga dasar yang berlaku mencapai sebesar 8,74 juta rupiah dan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB masih berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 24,22%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,37%, ini menandakan bahwa pembentukan PDRB telah didominasi oleh sektor-sektor perdagangan.

Kitapun menyadari bahwa APBD Kota Kendari bukanlah satu-satunya komponen biaya dan investasi yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi, maupun paling tidak APBD kita, dapat menjadi stimulan penggerak ekonomi masyarakat yang pada akhirnya membentuk suatu komponen kontribusi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi. Angka Kemiskinan di Kota Kendari menurut BPS pada tahun 2004 mencapai 37,67% dan di tahun 2005 menjadi 33,90, dan angka kemiskinan ini setiap tahunnya terus diupayakan penurunannya semaksimal mungkin melalui beberapa kebijakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kota Kendari.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana P2MK kepada Kelurahan dan Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masing-masing sektor berada pada ruangnya sendiri ketika melahirkan indikator kontribusi pada *Produced Domestic Regional Bruto* (PDRB) dari tahun ke tahun. Contohnya antara sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai kecenderungan sendiri - sendiri dilihat dari indikator ekonomi tahun - tahun sebelumnya dimana didominasi oleh sektor pertanian tetapi sejak tahun 2002 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan demikian maka secara teoritis dan empiris dapat menjadi argumen yang kuat bahwa melalui indikator kontribusi sektor dalam pertumbuhan PDRB dapat digunakan dalam menentukan sektor unggulan dan kecenderungannya pada masing - masing ekonomi regional dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pembentukan modal dan PDRB Kota Kendari secara teoritis statistik tidak hanya di pengaruhi oleh variable investasi APBD semata tetapi juga variable lain seperti dana Dekon, APBD Propinsi, APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber - sumber pembiayaan lainnya juga ikut mempengaruhi pertumbuhan PDRB, sehingga ketika kita membicarakan pertumbuhan PDRB maka tidak serta merta kita menyimpulkan bahwa APBD Kota Kendari merupakan faktor utama menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga faktor lainnya turut mendorong pertumbuhan.

Bapak, Ibu, Hadirin dan siding dewan yang terhormat

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemkot Kendari telah melaksanakan urusan desentralisasi melalui pemenuhan urusan terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dimana urusan wajib dilaksanakan oleh 23 SKPD; sedangkan untuk urusan pilihan, dilaksanakan oleh 4 SKPD.

Secara umum, hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan baik, urusan wajib maupun pilihan, akan dikemukakan sesuai Renstra dengan delapan urutan prioritas; sebagai berikut:

(1) Meningkatkan Kelestarian dan keserasian Lingkungan

Arah kebijakan pada isu ini adalah difokuskan pada upaya-upaya penataan, pengembangan dan pelestarian Kawasan Tahura Murhum, Nanga-Nanga dan Teluk Kendari sebagai sabuk hijau Kota Kendari, dan yang menjadi penciri utama Kendari sebagai "Kota Dalam Taman". Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai bidang prioritas ini, diantaranya:

- a. Pelaksanaan studi yang bertujuan menghasilkan Rencana Pengelolaan yang terpadu

berikut Rencana Tindak bagi kawasan tersebut. Rencana pengelolaan tersebut diintegrasikan dengan upaya penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan Talwa, Lindung dan DAS;

- b. Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam memfasilitasi konflik antara masyarakat sekitar Tahura dan pemerintah. disamping langkah-langkah pemberdayaan masyarakat hutan seperti pemberian kegiatan Mata Pencaharian Alternatif.
- c. Pemerintah Kota Kendari, hingga kini masih terus berupaya mencari solusi penanganan permukiman bagi masyarakat di Kawasan Tahura Murhum. Prinsipnya bahwa, Kawasan Tahura Murhum adalah kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas. Pemkot hanya mentoleransi pemanfaatan, seperti budidaya pertanian, yang memang pada kawasan budidaya, bukan pada kawasan lindung, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Kelompok Tani Pemanfaat Hutan (KTPH) yang telah ada. Kebijakan permukiman kembali (*re-settlement*) bagi pemukim liar di kawasan Tahura ini, adalah langkah-langkah prioritas ke depan.
- d. Disamping Tahura Murhum, kawasan hijau lainnya, yang penting dan strategis adalah Kawasan Teluk Kendari. Komitmen pemerintah Kota adalah tetap mempertahankan lima fungsi utama Teluk Kendari, yakni fungsi psikologis, fungsi ekologis, fungsi visual, fungsi ekonomi dan fungsi Sosial. Selama kurun waktu 2002 - 2007, kami telah berupaya untuk mendorong perhatian kepada Teiuk Kendari menjadi agenda atau komitmen multi pihak, antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pusat, juga dengan pihak swasta dalam hal ini PT Pelindo. Hingga saat ini telah ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen multi pihak tersebut dan akan terus dilanjutkan utamanya dalam hal penanggulangan abrasi pantai, pengerukan Teluk Kendari, agar tetap dapat dilabuhi, baik setingkat kapal kontainer maupun kapal-kapai penumpang nusantara. Untuk mengembangkan Kawasan Teiuk Kendari secara integratif dan berkesinambungan, Tahun 2004, Pemkot juga telah bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun prototipe ideal pengembangan ruang di Kawasan Teluk Kendari.
- e. Disamping langkah-langkah secara fisik dalam upaya pelestarian lingkungan ini, dilakukan pula upaya penyadaran masyarakat secara masal, yang dilaksanakan baik melalui media cetak radio dan televisi. Pemkot Kendari senantiasa terbuka dan

responsif terhadap segala isu-isu aktual terkait dengan permasalahan lingkungan, melalui dialog interaktif pada media massa. Salah satu contoh program yang dilaksanakan Pemkot bekerjasama dengan Kendari TV, program "Kampung Kita" dan "Kendari Bersih". Kedua acara tersebut, kami anggap cukup interaktif dan menyerap isu-isu aktual permasalahan lingkungan yang ada di tingkat kelurahan.

(2) Mengembangkan Kapasitas Peayanan Prasarana Dasar Perkotaan

Arah kebijaksanaan dari isu ini difokuskan untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan kualitas pelayanan kota yang berskala regional se Propinsi Sulawesi Tenggara seperti pelayanan di bidang pendidikan tinggi/akademi/kursus-kursus/latihan; kemudian bidang kesehatan; bidang pariwisata (sebagai tujuan maupun *transit point*) dan terakhir adalah pelayanan pelabuhan.

Kebijaksanaan peningkatan pelayanan prasarana dasar perkotaan ini, juga diarahkan dalam upaya memenuhi standar pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat seperti jalan kota, air bersih, persampahan, sanitasi, pasar dan terminal.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai implementasi fokus kebijaksanaan bidang prioritas ini secara ringkas adalah:

(a) Pelayanan Air Bersih

Kapasitas pelayanan air bersih bagi masyarakat terus ditingkatkan, sebagai upaya pencapaian standar pelayanan yang ditargetkan dalam Millenium Development Goals (MDGS), untuk air bersih pada Tahun 2015, yakni sebesar 80%.

Pada Tahun 2002, tingkat pelayanan air bersih yang berasal dari PDAM adalah sebanyak 13.607 Sambungan Rumah, kapasitas ini terus ditingkatkan, hingga Tahun 2006 telah meningkat sebanyak 15.402 Sambungan Rumah. Diakui bahwa percepatan penambahan sambungan rumah, relatif lambat dibandingkan dengan percepatan pertumbuhan rumah tangga yang membutuhkan sambungan bam. Kendala utama yang dihadapi adalah perlunya investasi pengembangan untuk meningkatkan kapasitas produksi (debit), serta pipa distribusi ke Sambungan Rumah.

(b) Persampahan

Pengelolaan sampah saat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Kendari, melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dengan sistem pengelolaan yang terdiri dari tahapan pewadahan, pengumpulan dan pemindahan ke TPS,

pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pelayanan sampah saat ini telah mencapai 90% dari jumlah kelurahan yang ada. Namun dibebberapa kelurahan masih dilayani dua kali seminggu.

Volume sampah Kota Kendari saat ini mencapai 549,31 M³ perhari dan yang tertangani 521,06 M³ atau sama dengan 94,8. Dengan demikian terjadi peningkatan kapasitas pelayanan dari hanya 54,2% pada tahun 2002, menjadi 94,8% pada Tahun 2006.

Upaya pelayanan terus ditingkatkan untuk wilayah di daerah pinggiran dan kawasan pedalaman. Kondisi pelayanan ini tentunya, disebabkan karena masih kurangnya armada sampah yang dimiliki, sehingga lebih diutamakan pada jalan utama dan jalan-jalan penghubung yang timbulan sampahnya banyak dan pada hunian padat penduduk. Disamping pelayanan limbah padat (sampah), peningkatan pelayanan untuk limbah cair (lumpur tinja) juga terus ditingkatkan. Rata-rata pelayanan limbah cair meningkat terus yakni 57% pertahunnya.

(c) Jalan Kota

Jalan kota merupakan sarana vital utama dalam mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, utamanya dalam fungsi memperlancar mobilitas barang dan jasa. Sesuai hasil pemutakhiran data jalan Kota Kendari, terlihat bahwa panjang jalan dalam Kota Kendari secara keseluruhan adalah 663.19 KM yang terdiri dari jalan nasional 46,72 Km, jalan propinsi 52,48 Km, jalan kota 374,35 Km, jalan lingkungan 246 Km serta jalan setapak 43,04 Km. Adapun gambaran kondisi jalan tersebut adalah sebagai berikut, jalan aspal baik 287,26 Km, jalan aspal sedang 40,24, jalan aspal rusak berat 16,4 Km, jalan kerikil baik 126,94 Km, jalan kerikil rusak sedang 43,96 km, jalan kerikil rusak berat 4,55 Km, jalan setapak rabat beton 30,24 Km, jalan setapak paving blok 12,79 Km, jalan perintisan kondisi tanah 100,7 Km.

Selama lima tahun anggaran dari Tahun 2002 hingga Tahun 2006 sebesar Rp 60,507,322,298 (enam puluh milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dana yang telah dialokasikan untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, dengan pencapaian pananganan sepanjang 352.69 Km, atau sebesar kurang lebih 70% dari total panjang jalan di Kota Kendari.

Sejalan dengan upaya peningkatan jalan kota, pemkot juga berupaya meningkatkan fasilitas penunjang, utamanya terminal. Terminal yang selama ini berfungsi adalah Terminal Puwatu, dan beberapa sub-sub terminal seperti Sub terminal Pasar Sentral Kota, Sub terminal Pasar Bam, Wua-wua dan Sub Terminal Pasar Baruga, Sub Terminal Pasar Baru, karena kondisi fisik dan keterbatasan ruang untuk pengembangan, maka mulai tahun 2007 sebagian angkutan umum untuk jurusan lapulu dan moramo dipindahkan di Kawasan Pasar Lapulu.

Hingga saat ini, pemkot masih belum dapat menuntaskan pembangunan Terminal Regional Tipe B, di Kecamatan Baruga. Diakui bahwa untuk penyelesaian Terminal Tipe B tersebut, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemkot Kendari, karena diperlukan adanya kerjasama dan komitmen pemerintah kabupaten terkait dalam hal ini Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan khususnya untuk akses jalan masuk ke terminal yang rencananya dari desa Totombe, serta pemerintah propinsi, dan daiam menggalang sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk penyelesaian terminal ini

(d) Drainase

Menyadari struktur fisik Kota Kendari yang sensitif terhadap permasalahan banjir, pemkot juga telah berespon terhadap kritik masyarakat, bahwa masih belum integratifnya sistim drainase Kota Kendari. Tahun 2005, Pemkot Kendari, bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin, telah merancang suatu Masterplan Sistem Drainase Kota Kendari. Studi ini merekomendasikan tujuh zonasi kawasan banjir di Kota Kendari. Setelah masterplan, dilanjutkan dengan pembuatan *Detailed Engineering Design (DED)*, masing-masing di Zone-1 (wilayah Kecamatan Mandonga), Zone-2 (wilayah Kecamatan Kendari Barat) dan Zone-7 (wilayah Kecamatan Baruga).

Langkah-langkah riil yang dilakukan adalah hingga saat ini telah dilaksanakannya penangangan sebanyak 60% dari 17 titik rawan banjir yang penting di wilayah Kota Kendari. Kita berharap, dengan perancangan secara bertahap dari sistim drainase Kota Kendari, yang diikuti dengan pembangunannya, secara bertahap namun pasti, kita dapat mengatasi permasalahan banjir di Kota Kendari. Langkah-langkah teknis, juga telah dilaksanakan, dengan mekanisme memperbesar saluran air pembuangan dengan

sistem kanal dan kantung lumpur. Meskipun demikian, harus diakui, bahwa membangun dengan sistem apapun dalam upaya penanggulangan banjir, tetap diperlukan partisipasi masyarakat, utamanya dalam ikut memelihara fungsi dari drainase dan kanal-kanal tersebut, menjaga wilayah resapan (*catchment area*) baik dalam kelestariannya maupun vegetasinya, utamanya mereka yang bermukim di sekitar kawasan hulu gunung nipa-nipa

(e) Pasar

Dalam upaya pengembangan pasar sebagai tempat jual beli yang aman, nyaman dan teratur, Pemerintah Kota juga sudah mencatat perubahan penting dengan pembangunan Mandonga Mall, sebagai momentum kita melakukan penataan pasar-pasar tradisional menjadi pasar modern, Memang diakui bahwa proses transisi perubahan ini, masih menimbulkan beberapa kontroversi, seperti tidak terakomodasinya beberapa pedagang lama karena tingginya nilai kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh pengembang.

Ekses negatif dari proses transisi pasar tradisional ke modern ini tentunya jadi pelajaran berharga bagi Pemkot, Namun, adalah telah menjadi komitmen saya dan jajaran Pemkot, untuk secara bertahap melakukan penataan pasar-pasar tradisional yang terkesan semrawut dan kumuh, menjadi tempat belanja yang nyaman dan aman.

Kedepan, pola yang dipilih untuk mempercepat proses penataan ini adalah masih mengandalkan pola kemitraan dengan pihak ketiga (*investor*), mengingat masih terbatasnya sumber pembiayaan Pemkot, sementara investasi pengembangan pusat belanja, cukup diminati oleh pihak ketiga/investor. Meski memilih pola investasi pihak ketiga, Pemkot senantiasa berkomitmen untuk melindungi hak-hak pedagang lama agar tetap akses dan memperoleh angsuran yang layak dan terjangkau, meskipun investasi telah diserahkan kepada pihak ketiga.

Penataan pasar tradisional dan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL), menjadi tempat dan kawasan yang nyaman telah juga dilakukan untuk beberapa pasar/kawasan diantaranya Pembangunan Kawasan Perdagangan Teluk Kendari (Kapetenda), pasar ikan higienis, pasar buah dan kawasan PKL Kendari Beach

(3) Meningkatkan Derajat Kesehatan

Arah kebijakan pada prioritas bidang ini adalah difokuskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat; memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat dalam bidang kesehatan dan status gizi serta meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai implementasi fokus kebijaksanaan bidang prioritas ini secara ringkas adalah :

- a. peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Pada kurun waktu Tahun 2002 -2006, pemkot telah membangun 3 buah puskesmas induk, hingga saat ini telah berjumlah 11 puskesmas. Tiga puskesmas diantaranya, yakni Puskesmas Puwatu, Poasia dan Abeli, telah dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas-puskesmas tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan di wilayah-wilayah perbatasan kota, dimana akses masyarakat ke tempat pelayanan kesehatan dianggap rendah dan terbatas. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, juga selama kurun waktu 2002 - 2007 telah dibangun 9 puskesmas pembantu (pustu), dengan demikian telah ada sejumlah 20 pustu yang aktif dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Kota juga telah melengkapi dengan 10 unit puskesmas keliling serta 160 Posyandu dan sarana kesehatan tersebut tersebar dalam 10 Kecamatan yang ada.
- b. Upaya peningkatan pelayanan rujukan dan lanjut, juga ditingkatkan dengan diperolehnya status sebagai Rumah Sakit Umum, bagi Rumah Sakit Abunawas. Hingga saat ini, RSUD Abunawas terus berbenah diri, sebagai Rumah Sakit alternatif di Kota Kendari, dengan fasilitas pelayanan 21 kamar, termasuk 3 buah kamar kelas 1 dan 2 buah kamar VIP, dengan kelengkapan 4 orang tenaga dokter spesialis.

Secara umum, dampak yang diperoleh dari peningkatan upaya pelayanan kesehatan, adalah menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dimana pada Tahun 2002 masih sebesar 37 per 1000 kelahiran, sejak Tahun 2005 menurun menjadi 14 per 1000 kelahiran. Demikian halnya untuk Angka Kematian Ibu (AKI), menunjukkan angka yang relatif kecil, meskipun berfluktuasi. Pada Tahun 2002 AKI adalah 1 orang dari 5239, sedangkan Tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 2 orang, namun berkurang menjadi 0 orang pada Tahun 2006.

(4) Memantapkan Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pada prioritas bidang ini difokuskan pada upaya-upaya

- (1) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui jalur sekolah maupun pendidikan luar sekolah, utamanya bagi kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran perkotaan dan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah melalui perbaikan sarana/prasarana pendidikan, kemudahan akses dari wilayah permukiman ketempat pendidikan.
- (2) Membantu kelanjutan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) bagi siswa dari keluarga kurang mampu; mengembangkan kualitas pendidikan dan keterampilan serta kesejahteraan tenaga pendidik (guru),
- (3) Mendorong pembentukan kelembagaan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, diantaranya dengan pembentukan Dewan Pendidikan Kota Kendari, Pemantapan Keorganisasian komite sekolah di masing-masing sekolah. Hasil-hasil yang telah dicapai dari implementasi kebijaksanaan di atas adalah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk semua kelompok usia; masing-masing usia 7 - 12 tahun, nilai APS sebesar 96,99%, usia 13 - 15 Tahun, nilai APS sebesar 88,99% dan usia 16 -18 Tahun sebesar 73,82%.

Hasil yang tidak kalah penting lainnya sebagai gambaran upaya pemerataan pendidikan adalah konsistensi dalam mempertahankan angka melek huruf. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2005, angka melek huruf di Kota Kendari berkisar sebesar 97%. Selain itu Pemerintah Kota telah menandatangani MOU bertempat di Hotel Athaya tentang Wajib belajar 9 tahun antara Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang akan diturunkan dananya secara bertahap, dimana Pemda Kota diminta untuk menyiapkan sharing dana sebagai dana pendamping

5. Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Arah kebijakan pada prioritas bidang ini difokuskan pada upaya-upaya

- a) Mendorong penguatan kehidupan berbangsa yang dilandasi dengan semangat kerjasama seluruh komponen suku, agama, dan antar kelompok masyarakat

yang ada di Kota Kendari. Kondisi ini ditunjukkan Dengan aktif dan berkembangnya organisasi berbasis etnik maupun agama, dimana masing-masing kelembagaan tidak bersifat eksklusif, namun terbuka terhadap kerjasama dan partisipasi

- b) Mendorong kinerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja perangkat daerah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin efektifnya peran DPRD dalam bermitra dengan eksekutif dalam menghasilkan perda-perda; disamping juga secara seksama memberikan fungsi pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksekutif, dalam pelaksanaan tugas pembangunan maupun kemasyarakatan.
- c) Meningkatkan efektifitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat pada berbagai forum kegiatan pembangunan. Organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, wanita, mendapatkan ruang gerak dan dukungan baik dalam melaksanakan kegiatannya sendiri, maupun yang bermitra dengan pemerintah kota. Juga untuk masalah ini kami telah memberikan bantuan transpor kepada para imam mesjid dan pendeta serta ketua RT/RW, walau jumlahnya masih relatif kecil namun paling tidak Pemerintah Kota telah memberikan perhatian.
- d) Pada Tahun 2006 kita juga telah merampungkan penulisan Sejarah Kota Kendari. Penulisan sejarah ini akan menjadi tonggak penting tentang awal keberadaan dan dinamika perkembangan Kota Kendari.

6. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Kepemerintahan yan Baik

Dari isu ini ditetapkan beberapa prioritas kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Menyusun/menetapkan Peraturan Daerah yang merupakan aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi dasar terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan landasan bagi masyarakat dalam memperoleh dan memberikan hak dan kewajibannya bagi rasa keadilan, ketentraman dan kepastian hukum. Sebagai wujud implementasi dan peran Pemerintah Kota dalam memberikan kerangka regulasi dalam pembangunan, pada kurun waktu Tahun 2002 - 2007 telah dihasilkan untuk:
 - ❖ Bidang Pembangunan ada 23 Perda dan 31 Peraturan Walikota;

- ❖ Bidang Pemerintahan, ada 34 Perda dan 14 Peraturan Walikota;
 - ❖ Bidang Sosial Ekonomi kemasyarakatan ada 52 Perda dan 12 Peraturan Walikota.
- b. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum /Peraturan Daerah;
 - c. Menegakan hukum/Peraturan Daerah secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia;
 - d. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum/Peraturan Daerah (PPNS) untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan/pelatihan serta pengawasan yang efektif;
 - e. Mewujudkan/membentuk Kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

7. Mempercepat pemulihan Ekonomi Daerah, Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran

Dari isu ini ditetapkan beberapa prioritas kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Mendorong pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat mempercepat pemulihan perekonomian rakyat, melalui instrumen kemudahan permodalan, pembinaan keterampilan dan kemudahan pasar, disamping rehabilitasi dan pengembangan sarana/prasarana perekonomian seperti pasar dan terminal,
- b. Secara bertahap mengimplementasikan kebijaksanaan "desentralisasi" pengelolaan siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) ke tingkat kelurahan dan kecamatan, utamanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal, sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Salah satu wujud program yang strategis sebagai implementasi komitmen ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (P2MK). Sejak diluncurkan Tahun 2003, telah diluncurkan dana sejumlah Rp 16,750,000,000, (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta) yang dialokasikan setiap tahunnya masing-masing untuk Kecamatan sebesar Rp 100 juta dan kelurahan Rp 50 juta. Dari evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian,

Universitas Haluoleo terhadap efektifitas kegiatan ini, menunjukkan bahwa P2MK efektif mendorong peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, utamanya di bidang pembangunan sarana/prasarana fisik, dapat mendorong kelembagaan demokratisasi di tingkat kelurahan melalui mekanisme perencanaan, pengawasan dan tanggungjawab secara bersama oleh masyarakat. Meskipun demikian, diakui bahwa P2MK, masih belum optima! dalam mendorong pelembagaan ekonomi di masyarakat, umumnya kegiatan modal bergulir yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. Penguatan kelembagaan ekonomi yang sesuai, seperti bentuk koperasi ataupun Bank Perkreditan Rakyat, merupakan pilihan kelembagaan yang dimungkinkan untuk pengembangan dana P2MK bidang ekonomi ke depan. Disamping P2MK, program lain yang dilaksanakan dengan pola penyerahan pengelolaan langsung kepada masyarakat dengan Pola Tribina adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Sejak awal pelaksanaannya, pada Tahun 2003, telah sejumlah Rp 3,975,000,000, - (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dana yang dialokasikan kepada 21 kelurahan di Kecamatan Mandonga, Abeli dan Poasia, yang langsung dikelola oleh BKM masing-masing kelurahan.

- c. Memperkuat kinerja dan kualitas pelayanan kota yang berskala regional se-Propinsi Sulawesi Tenggara (terhadap kota-kota disekitarnya: Unaaha, Kolaka, Bombana, Raha dan Bau-bau) seperti pendidikan tinggi/akademi/kursus-kursus/iatihan, kesehatan (rumah sakit) dan pariwisata (sebagai tujuan maupun *transit point*).
- d. Memperkuat langkah-langkah strategis promosi potensi daerah, kebijaksanaan insentif dan dis-insentif seperti tax holiday bagi pengembangan usaha, diantaranya melalui penyederhanaan pelayanan dan perlindungan (kepastian hukum/peraturan) dalam kegiatan usaha/investasi.

Untuk mengimplementasi upaya-upaya tersebut di atas, pemkot terus memantapkan kinerja Kantor Pelayanan Perizinan, sebagai "etalase" citra pelayanan Pemerintah Kota Kendari. Upaya mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi ke pelayanan "satu pintu" terus dilakukan. Pada Tahun 2002 ada 16 macam perizinan yang diurus lewat Kantor perizinan, kemudian kini Tahun 2007 telah bertambah menjadi 40 jenis perizinan. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yakni, transparan, efisien, efektif dan akuntabel,

juga senantiasa menjadi landasan dalam pelayanan, disamping juga aspek-aspek kejelesan, keramahan dan kenyamanan menjadi pelengkap dalam pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan saat ini.

- e. Mendorong pembangunan infrastruktur utamanya jalan, air bersih dan listrik, guna menciptakan keunggulan kompetitif terhadap daerah lainnya;
- f. Mendukung terbentuknya pembangunan kawasan sentra industri kecil yang spesifik seperti industri meubeleur dan kawasan pariwisata. Bersama dengan itu pula diperlukan eksisnya lembaga-lembaga yang memungkinkan akses usaha kecil terhadap permodalan dan pasar, seperti pengembangan pusat informasi (telecenter) di Lapulu, yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin, akses terhadap penggunaan internet.

8. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Dari isu ini ditetapkan beberapa prioritas kebijaksanaan sebagai berikut::

- a. Terus melakukan evaluasi struktur kelembagaan organisasi kota, hingga mendapatkan format yang ideal dan optimal, sesuai potensi daerah dan dengan prinsip hemat struktur namun kaya fungsi.
Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan yang cepat dan responsif secara langsung bagi masyarakat, kita telah memekarkan kelurahan hingga saat ini menjadi 64 Kelurahan, dengan 10 wilayah kecamatan. Kebijakan ini diharapkan semakin dapat menunjang tercapainya tingkat pelayanan yang cepat, adil dan proporsional bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah, mulai dari sistem kelembagaan, hingga Sumberdaya Manusia. Untuk menunjang pencapaian harapan tersebut, maka pemkot menyadari perlunya peningkatan SDM aparat secara berjenjang. Selama kurun waktu 2002-2007 telah memberikan beasiswa sebanyak 50 pegawai untuk melanjutkan pendidikan setingkat master (S-2). Secara bersamaan pemkot juga mengembangkan kualitas pegawai baik melalui pendidikan kedinasan, fungsional maupun keahlian khusus
- c. Melegalisasi penetapan melalui perda bagi upaya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), seperti Penetapan Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Hak-hak Memperoleh informasi Publik atau biasa dikenal

dengan naman "Perda Transparansi" dan Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijaksanaan Publik.

d. Merealisasi secara konsisten prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak Tahun 2004, secara Pemkot telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya, yang mendapat penilaian rata-rata sebagai berikut:

- ❖ Tahun 2004: dari *29 sasaran* dengan *271 indikator*, 88,31% dikategorikan SANGAI BAIK
- ❖ Tahun 2005: dari *39 sasaran* dengan *374 indikator*, 96,52% dikategorikan SANGAT BAIK
- ❖ Tahun 2006: dari *38 sasaran* dengan *540 indikator*, 98,67% dikategorikan SANGAT BAIK

Sidang Dewan dan hadirin Yang berbahagia

Dalam upaya mensinergikan program nasional dan program di daerah, Pemerintah Kota Kendari, juga melakukan beberapa tugas pembantuan.

Diakui bahwa tugas pembantuan dapat membantu keterbatasan sumber pendanaan pemerintah kota, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, namun beberapa hal masih perlu jadi perhatian yakni belum begitu sinkronnya, kebutuhan yang diusulkan oleh kota, disamping masih kurangnya koordinasi SKPD pelaksana dengan pemerintah kota, sehingga sulit untuk dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat lintas administratif, pengelolaan wilayah-wilayah perbatasan, membangun jaringan dalam hal informasi dan pengalaman, maka Pemkot menyadari pentingnya menguatkan forum Kerjasama antar daerah. Untuk tingkat regional Pemkot Kendari aktif dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Untuk forum ini, Walikota Kendari, menjabat sebagai Ketua Komwil VI Apeksi meliputi Kota-kota sebagian Kalimantan, Sulawesi Maluku, NTT dan Papua.

Sedangkan untuk tingkat Lokal, pemkot juga telah merintis peluang kerjasama dengan Pemda terdekat, seperti Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam hal pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu; dengan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam hal pelestarian kawasan tangkapan air DAS KONAWAHA, sebagai sumber air bersih Kota Kendari.

Selanjutnya, dalam upaya mendorong peranserta swasta dalam pembangunan, dikembangkan pula kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama yang telah dilaksanakan diantaranya, dalam Pembangunan Mai Mandonga dengan PT Bina Bakti Persada dan Pembangunan Pasar Tradisional/pasar basah Mandonga dengan PT Kurnia Sulawesi Karyatama. Pola kerjasama yang dilakukan adalah Pola *Build, Operation and Transfer (BOT)*, dimana pihak pengembang membangun, kemudian diberikan hak pengelolaan masing-masing selama 25 tahun dan 20 tahun, dan setelah itu diserahkan kepada Pemerintah Kota.

Bentuk kerjasama yang lain adalah Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dalam rangka mensukseskan pelaksanaan MTQ Tingkat nasional ke-21 yang lalu, yang dilaksanakan dengan PT. Tulus Karya Wisesa dengan pola *Build and Transfer (BT)*, dimana pihak pengembang membangun, dan setelah itu pengelolaanya diserahkan kepada Pemerintah Kota.

Hadirin dan undangan serta Sidang Dewan yang saya muliakan,

Kamipun menyadari bahwa selama menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah tidak seindah dan semulus seperti apa yang dibayangkan, namun banyak permasalahan yang timbul dan perlu disikapi secara bijak; ada beberapa permasalahan yang perlu kami kemukakan, antara lain;

- 1) Di bidang pengelolaan keuangan permasalahan yang sering timbul adalah:
 - akibat penerimaan pendapatan yang berfluktuasi sulit untuk mempertahankan target yang disepakai karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi APBD.
 - Masih terjadi kesalahan administrasi dalam pencacatan, pembukuan dan pelaporan keuangan, akibatnya sering terindikasi terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
 - Dalam hal penarikan pajak dan retribusi, masih ada sebagian kecil masyarakat yang tingkat kesadaran untuk membayar pajak/retribusi masih rendah, dan seringnya terjadi penunggakan pajak oleh obyek pajak.
 - Tidak sebandingnya penerimaan keuangan dan kebutuhan pembiayaan pembangunan, sehingga masih banyak program-program prioritas yang tidak terlaksana akibat terbatasnya sumber-sumber pembiayaan
- 2) Di bidang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

- akibat dinamika perkembangan kota, di masyarakat banyak timbul kasus-kasus sengketa tanah milik, bahkan ada beberapa fasilitas umum yang telah digunakan sekian puluh tahun masih juga ada yang menggugat. Juga adanya kegiatan fisik pembangunan yang terhambat akibat pemilik lahan yang tidak mau melepas sedikit tanahnya untuk dilewati pembangunan fasilitas umum.
 - Masih adanya asset-asset baik milik Pemerintah Propinsi maupun Pemda Kabupaten Konawe yang hingga kini belum jelas penyerahannya ke Pemda Kota.
 - Terkadang muncul dalam tugas pembantuan kegiatan yang tidak diusulkan, sehingga ada program tidak bersinergi dengan program yang dibiayai dari APBD, selain itu kurangnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari tugas pembantuan, sehingga terkesan tidak transparan.
- 3) di bidang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
- kurangnya koordinasi dengan instansi vertikal sehingga sering terjadi mis komunikasi utamanya bagi proyek-proyek yang masuk dalam wilayah kota tidak di koordinasikan sebelumnya.

Selain itu perlu juga kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat bahwa pada awal kami menjabat sebagai walikota jumlah kecamatan hanya 3 dan kelurahan 21, namun hingga akhir masa jabatan saat ini kecamatan telah menjadi 10 dan kelurahan 64. tujuannya untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2006, akhir masa Jabatan Walikota Kendari Tahun 2002 - 2007, sebagai pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 serta LAKIP Kota Tahun 2006 dan APBD Hasil Perhitungan Tahun Anggaran 2006 yang kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat legislatif.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa segala hasil yang telah dicapai selama 5 (Lima) tahun pada periode kepemimpinan saya yang kedua ini, adalah buah kerjakeras pada seluruh aparat pada jajaran pemerintah Kota Kendari, yang tentunya didukung oleh partisipasi dan kerjasama yang baik oleh seluruh komponen masyarakat dalam membangun Kota Kendari, dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih.

Untuk segala partisipasi yang tulus dan tanpa pamrih tersebut, saya patut memberikan apresiasi, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya.

Namun, meskipun segala ikhtiar telah kita laksanakan dan beberapa kemajuan telah dicapai, saya menyadari bahwa, kekurangan, kelemahan, permasalahan masih menjadi bagian dari keberhasilan yang kita capai.

Saya berharap, dengan kejernihan hati, ketajaman fikir yang disertai dengan keteguhan tekad, kepemimpinan daerah berikutnya beserta jajarannya, dapat melanjutkan kebijaksanaan yang penting yang telah saya rintis, yang dimana telah nyata memberikan manfaat bagi masyarakat, dan disamping itu pula, dapat menyempurnakan penyelesaian berbagai permasalahan dan kendala yang masih butuh penanganan lebih lanjut.

Akhirnya melalui kesempatan ini sekali saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kota Kendari sebagai Mitra Pemerintah, rekan-rekan Muspida, Tokoh Masyarakat, para Camat, Lurah, Kepala SKPD Lingkup Kota Kendari dan Pimpinan-Pimpinan Ormas, Parpol serta semua pihak yang telah membantu, bekerjasama dan berpartisipasi, selama masa kepemimpinan saya. Semoga Allah SWT, memberkati dan memberikan limpahan berkah, bimbingan dan perlindungan-Nya serta memberikan pahala yang setimpal kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat Kota Kendari, yang tercinta ini. Amin

Kendari, 12 April 2007

WALIKOTA KENDARI

Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si